

Padahal sektor ekspor itu diharapkan sebagai sumber devisa negara dan mendukung industri dalam negeri maupun pemberdayaan kekayaan dan Indonesia untuk menggairahkan perekonomian rakyat.

3. Berdasarkan pengamatan sebagaimana terlihat pada tabel IV ternyata jumlah pelanggaran makin meningkat, ini menunjukkan bahwa dengan kemudahan dan kepercayaan (*self assessment*) dalam pengurusan ekspor import tidak bergayung sambut dengan kesadaran para pengusaha dalam membayar bea masuk. Dikhawatirkan dengan denda administrasi yang ringan, pengusaha hanya menganggap sebagai risiko perusahaan saja, sehingga tidak membuat jera dan sadar atas pelanggaran.
4. Lembaga *schikking* sebagaimana terdapat pada pasal 113 UU No. 10 Tahun 1995 tidak dilaksanakan secara efektif, oleh karena pelanggaran administrasi yang semestinya masuk katagori tindak pidana atau penyelundupan, ditafsirkan hanya sebagai penyelundupan administrasi biasa, sehingga pengusaha hanya ditekan dengan Surat Paksa saja untuk melunasi bea masuk. Berdasarkan analisa tersebut di atas peneliti berpendapat bahwa lembaga *schikking* perlu dihidupkan kembali di Kantor Bea dan Cukai Daerah Tingkat I Jawa Timur.
5. Penyuluhan dan sosialisasi Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 perlu ditingkatkan khususnya kepada para pelaku ekspor dan import dan para penegak hukum, agar dalam pelaksanaan di lapangan tidak terjadi tumpang tindih dan berebut kewenangan antara polisi dan petugas Bea Cukai.

Catatan

¹Romli Atmasasmita, **Repita Selekt Hukum Pidana dan Kriminologi**, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 67

²Imam Syahputra Tunggal dan Amien Widjaja Tunggal, **Peraturan Kepabeanan dan Cukai di Indonesia**, (Edisi Lengkap), harvarindo, Jakarta, 1996, hal. V

³ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, **Pembahasan Hukum, (Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia)**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 192

⁴ Leden Marpaung, **Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994., hal. 3.

⁵ Andi Hamzah, **Perkembangan Hukum Pidana Khusus**, Rnika Cipta, Jakarta 1990, hal 16.

Daftar Rujukan

Arief, Barda Nawawi, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Cipta Aditya Bakti, Bandung 1996.

Atmasasmita, Romli, **Repita Selekt Hukum Pidana dan Kriminologi**, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Gautama, Sudargo, **Hukum Dagang Internasional**, Alumni, Bandung, 1997.

Hamzah, Andi, **Perkembangan Hukum Pidana Khusus**, Rnika Cipta, Jakarta 1990.

Marpaung, Leden, **Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi**, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Meliala, Adrianus, **Menyingkap Kejahatan Kera Putih**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Mulano, Martias Gelar Imam Radjo, **Pembahasan Hukum, (Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia)**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Suparni, Niniek, **Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Tunggal, Imam Syahputra dan Amien Widjaja Tunggal, **Peraturan Kepabeanan dan Cukai di Indonesia**, (Edisi Lengkap), harvarindo, Jakarta, 1996.